

BAB II

KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

2.1 Model Penelitian Terdahulu

Berbagai penelitian empiris telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu mengenai tata kelola perusahaan yang didasarkan pada kerangka teori keagenan.

Teori keagenan merupakan dasar yang digunakan untuk memahami prinsip tata kelola perusahaan salah satunya adalah biaya keagenan yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai sebuah kontrak dimana satu atau lebih pemilik (*principal*) menyewa manajer (*agent*) untuk bertindak atas namanya, mendelegasikan kekuasaan dalam pengambilan keputusan sehingga menyebabkan timbulnya biaya agensi (*agency cost*) untuk melakukan pengawasan terhadap manajemen.

Fama dan Jensen (1983) mengemukakan bahwa masalah keagenan timbul dikarenakan isi kontrak tidak benar-benar tertulis dan ditegaskan. Biaya keagenan ialah biaya untuk strukturisasi, monitor untuk mengikat kontrak antara manajer dan pemilik kepentingan. Shleifer dan Vishny (1997) menyatakan bahwa penerapan mekanisme tata kelola perusahaan yang baik akan menjamin pemilik untuk mendapatkan pengembalian sesuai dengan modal yang ditanamkan.

Hermalin dan Weisbach (1991), Connely dan Limpaphayom (2003), Garg (2007), Adams dan Ferreira (2009), Ibrahim *et al.* (2010), Sulong dan Nor (2010), Horvath dan Spirollari (2012), Rehman dan Shah (2013) menganalisa pengaruh tata kelola perusahaan menggunakan komisaris independen yang diukur dengan Tobin's Q. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Pearce

dan Zahra (1992), Daily dan Dalton (1993), Jensen (1993), Ponnu (2008), Christensen *et al.* (2010), Azzam *et al.* (2011), Abbasi *et al.* (2012), Malik (2012), Latif *et al.* (2013) yang menambahkan dualitas *Chief Executive Officer (CEO)* serta penelitian yang dilakukan oleh Reddy *et al.* (2008) dan Tornyeva dan Wereko (2012) yang menambahkan kebijakan dividen terhadap kinerja perusahaan. Selain itu Shukeri *et al.* (2012) juga menambahkan variabel keragaman jenis kelamin terhadap kinerja perusahaan. Gondrige *et al.* (2012) menambahkan variabel kekuasaan *CEO* dan tingkat dari tata kelola terhadap kinerja perusahaan.

Lipton dan Lorsch (1992), Hermalin dan Weisbach (2003), Garg (2007), Sulong dan Nor (2008), Jaafar dan EL-Shawa (2009), Dar *et al.* (2011), Nyamongo dan Temesgen (2011), Chugh *et al.* (2012), Ghazali (2012), Tarus dan Omandi (2013) menganalisa pengaruh ukuran dewan terhadap kinerja perusahaan. Penelitian ini kemudian dikembangkan oleh Ehikioya (2009) dan Tornyeva dan Wereko (2012) yang menambahkan keahlian dewan terhadap kinerja perusahaan. Haniffa dan Huddaib (2006), Rashid (2011) dan Latif *et al.* (2013), menambahkan variabel komposisi dewan serta Kumar dan Singh (2012) menggunakan variabel ukuran perusahaan, umur perusahaan, dan solvabilitas terhadap kinerja perusahaan. Penelitian lebih lanjut dikembangkan oleh Hussin dan Othman (2012) yang menggunakan persentase kepemilikan direktur non-eksekutif, ketua independen, dualitas *CEO* terhadap kinerja perusahaan.

Jensen dan Meckling (1976), McConnell dan Servaes (1990), Horvath dan Spirollari (2012), Desoki dan Mousa (2012), Shukeri dan Shin (2012),

Rehman dan Shah (2013) menganalisa pengaruh kepemilikan manajerial terhadap kinerja perusahaan yang diukur dengan Tobin's Q. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan Mandaci dan Gumus (2010), Sheikh *et al.* (2011), yang menambahkan konsentrasi kepemilikan dalam penelitiannya. Boone (2011) dan Reyna *et al.* (2012) menambahkan variabel kepemilikan keluarga serta Sulong dan Nor (2008) yang menggunakan variabel kepemilikan asing terhadap kinerja perusahaan. Wang dan Oliver (2009) juga menambahkan variabel kepemilikan *Blockholder's* dalam penelitian pengaruh komposisi dewan terhadap kinerja perusahaan.

Jaher dan Ali (2005), Abbasi *et al.* (2012) meneliti pengaruh kepemilikan institusional terhadap kinerja perusahaan yang diukur dengan Tobin's Q. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Alfaraih *et al.* (2012) yang menambahkan kebijakan dividen terhadap kinerja perusahaan. Penelitian lebih lanjut dilakukan oleh Tornyeva dan Werekko (2012) yang menggunakan variabel kepemilikan asing serta Alipour (2013) yang menambahkan variabel konsentrasi kepemilikan, kepemilikan keluarga, kepemilikan pemerintah, dan kepemilikan individu terhadap kinerja perusahaan.

Zhang *et al.* (2007), Sunday (2008), Reddy *et al.* (2008), Yasser *et al.* (2011), Gill dan Obradovich (2012), Fauzi dan Locke (2012), Tarus dan Omandi (2013) menganalisa pengaruh komite audit terhadap kinerja perusahaan. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Christensen *et al.* (2010) yang menambahkan variabel kehadiran komite audit serta Dar *et al.* (2011), Malik (2012) yang menggunakan variabel jumlah rapat komite audit. Bouaziz dan

Triki (2012) yang menambahkan variabel jumlah komite audit independen dan ukuran dari komite audit terhadap kinerja perusahaan.

Jensen dan Murphy (1990), Montemayor (1996), Klein (1998), Reddy *et al.* (2008), Murwaningsari (2009), Christensen *et al.* (2010), Yameesri dan Herath (2010), Malik (2012) menganalisa pengaruh tata kelola perusahaan yang diukur dengan variabel komite nominasi dan remunerasi terhadap kinerja perusahaan. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Calleja (1999) yang menambahkan variabel komite lingkungan terhadap kinerja perusahaan.

Chugh *et al.* (2011), Najjar (2012), Bouaziz dan Triki (2012), Al-Matari *et al.* (2012), Mehrabani dan Dadgar (2013), melakukan penelitian dengan menggunakan variabel kontrol berupa ukuran perusahaan terhadap kinerja perusahaan yang diukur dengan Tobin's Q. Penelitian ini berbeda dengan Bohren dan Strom (2010) dan Reyna *et al.* (2012) yang menambahkan variabel kontrol resiko dalam penelitiannya. Penelitian lebih lanjut dilakukan oleh Rashid (2011), Yameesri dan Herath (2010) yang menggunakan tingkat pertumbuhan terhadap kinerja perusahaan. Hu *et al.* (2009) menggunakan variabel ukuran dewan dan Tornyeva dan Wereko (2012) yang menambahkan variabel umur perusahaan dan tangibilitas aset terhadap kinerja perusahaan.

Haniffa dan Hudaib (2006), Reddy *et al.* (2008), Jaafar dan El-Shawa (2009), Wang dan Oliver (2009), Irina dan Nadezhda (2009), Khatab *et al.* (2011), Hamdan *et al.* (2013) menganalisa pengaruh solvabilitas terhadap kinerja perusahaan yang diukur dengan Tobin's Q. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Alfaraih (2012) menambahkan variabel kontrol

berupa tipe audit, kebijakan dividen dan kategori industri terhadap kinerja perusahaan. Alipour (2013) menambahkan variabel kontrol rasio lancar dan tipe industri terhadap kinerja perusahaan.

2.2 Kinerja Perusahaan

Salah satu informasi penting dari laporan keuangan yang sering digunakan investor sebagai determinan utama pengambilan keputusan investasi adalah kinerja perusahaan (Sunardi, 2010). Kinerja merupakan gambaran mengenai keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi perusahaan.

Penilaian terhadap kinerja perusahaan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi perusahaan sehingga mampu mencerminkan prestasi kerja perusahaan dalam periode tertentu. Menurut Suhardjanto dan Anggitarani (2010) kinerja perusahaan merupakan sesuatu yang dihasilkan oleh perusahaan dalam periode tertentu dan hasil dari kinerja tersebut harus dapat diukur dan menggambarkan kondisi empiris perusahaan tersebut.

Kinerja perusahaan yang baik merupakan langkah awal tercapainya tujuan suatu perusahaan. Penilaian terhadap kinerja perusahaan bermanfaat untuk membantu investor, kreditor dan calon investasi lain dalam membuat keputusan investasi serta menentukan prospek dan tujuan perusahaan di masa yang akan datang. Selain itu perusahaan yang memiliki kinerja perusahaan yang baik cenderung lebih mendapatkan kepercayaan dari publik untuk melakukan investasi pada perusahaan.

2.3 Pengaruh Variabel Independen terhadap Dependen

2.3.1 Komisaris Independen

Pengertian komisaris independen menurut Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia (2006) adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata untuk kepentingan perseroan.

Posisi dewan komisaris sangat penting dalam menjaga keadilan bagi kepentingan pemegang saham mayoritas dan perlindungan terhadap saham minoritas bahkan kepentingan para pemegang saham lainnya yang ada dalam perusahaan. Peran dari dewan komisaris adalah melakukan fungsi pengawasan, oleh sebab itu adanya komisaris independen diharapkan mampu meningkatkan peran dewan komisaris sehingga tercipta tata kelola yang baik di dalam perusahaan (Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia, 2006)

Berdasarkan pedoman tata kelola perusahaan yang baik, komposisi atau jumlah komisaris independen tidak ditentukan namun dalam peraturan Bapepam-LK, Emiten atau perusahaan publik wajib memiliki sekurang-kurangnya satu komisaris independen sedangkan Bursa Efek Indonesia mewajibkan sekurang-kurangnya 30% dari dewan komisaris adalah komisaris independen. Semakin besar jumlah komisaris independen dalam perusahaan, maka kinerja perusahaan akan semakin meningkat (Nyamongo & Temesgen, 2011).

Abbasi, Kalantari dan Abbasi (2012) menganalisa pengaruh tata kelola pada perusahaan makanan yang terdaftar pada *Tehran Stock Exchange (TSE)* pada tahun 2002-2011 di Iran. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa adanya komisaris independen secara signifikan positif mempengaruhi kinerja perusahaan. Penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Connelly dan Limpaphayom (2003), Reddy *et al.* (2008), Adams dan Ferreira (2009), Malik (2012), Sulong dan Nor (2010), Azzam *et al.* (2011), Rehman dan Shah (2013).

Garg (2007) melakukan penelitian pengaruh komisaris independen terhadap kinerja perusahaan pada 200 perusahaan pada tahun 1997-2003 di India. Hasil dari penelitian menemukan bahwa komisaris independen berpengaruh signifikan negatif terhadap kinerja perusahaan. Penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Ponnu (2008), Christensen *et al.* (2010), Horvath dan Spirollari (2012), Shukeri *et al.* (2012).

Hasil penelitian mengenai pengaruh komisaris independen juga masih beragam. Bohren dan Strom (2010) menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara jumlah komisaris independen dan kinerja pasar perusahaan. Penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Ibrahim *et al.* (2010), Gondrige *et al.* (2012), Kumar dan Singh (2012), Tornyeva dan Wereko (2012), Latif *et al.* (2013) mengemukakan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan.

2.3.2 Ukuran Dewan

Ukuran dewan adalah jumlah dari anggota dewan didalam perusahaan.

Yermarck (1996) mengemukakan bahwa semakin banyaknya anggota dewan dalam perusahaan dapat memberikan lebih banyak pendapat dalam proses pengambilan keputusan. Chugh, Meador dan Kumar (2011) melakukan penelitian di India pada tahun 2009 dengan menggunakan perusahaan yang terdaftar pada *National Stock Exchange* (NSE) menemukan bahwa ukuran dewan yang lebih besar menciptakan lebih banyak kesempatan dan sumber daya untuk kinerja keuangan yang lebih baik

Penelitian mengenai ukuran dewan berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja perusahaan sudah banyak dilakukan diantaranya Wang dan Oliver (2009), Ehikioya (2009), Jaafar dan EL-Shawa (2009), Rashid (2011), Sheikh *et al.* (2011), Gondrige *et al.* (2012), Desoki dan Mousa (2012), Fauzi dan Locke (2012), Kumar dan Singh (2012), Tornyeva (2012), Tarus dan Omandi (2013), Latif *et al.* (2013), Rehman dan Shah (2013).

Haniffa dan Hudaib (2006), Reddy *et al.* (2008), Sulong dan Nor (2008), Christensen *et al.* (2010), Hussin dan Othman (2012) menunjukkan bahwa ukuran dewan berpengaruh signifikan negatif terhadap kinerja perusahaan. Ukuran dewan yang besar berpengaruh negatif terhadap kinerja pada perusahaan perbankan (Nyamongo & Temesgen, 2011)

Connely dan Limpaphayom (2003) menunjukkan bahwa ukuran dewan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan Penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Hu *et al.* (2009), Yameesri dan Herath

(2010), Ibrahim *et al.* (2010), Dar *et al.* (2011), Alfaraih *et al.* (2012), Gill dan Obradovich (2012), Ghazali (2012), Al-Matari *et al.* (2012), Horvath dan Spirollari (2012) bahwa ukuran dewan berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja perusahaan.

2.3.3 Kepemilikan Manajerial

Menurut teori keagenan pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan perusahaan dapat menimbulkan konflik keagenan karena prinsipal dan agen memiliki kepentingan masing-masing yang saling bertentangan karena agen dan prinsipal berusaha memaksimalkan kepentingan masing-masing.

Menurut Jensen dan Meckling (1976) teori keagenan bisa dikurangi apabila manajer mempunyai kepemilikan saham dalam perusahaan. Hal ini karena pihak manajemen juga akan memperoleh manfaat langsung atas keputusan yang diambilnya serta menanggung resiko secara langsung atas keputusan salah yang diambilnya. Oleh sebab itu kepemilikan saham dari pihak dalam perusahaan merupakan insentif untuk meningkatkan kinerja perusahaan.

McConnell dan Servaes (1990), Haniffa dan Hudaib (2006), Murwaningsari (2009), Wang dan Oliver (2009), Fauzi dan Locke (2012), Horvath dan Spirollari (2012) menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja perusahaan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sheikh *et al.* (2011), Boone (2011), Reyna *et al.* (2012) menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan negatif terhadap kinerja perusahaan.

Hal ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Jaher dan Ali (2005), Sulong dan Nor (2008), Desoki dan Mousa (2012), Shukeri *et al.* (2012) bahwa kepemilikan managerial tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

Mandaci dan Gumus (2010), Rehman dan Shah (2013) mengungkapkan bahwa tidak adanya hubungan antara kepemilikan manajerial terhadap kinerja perusahaan.

2.3.4 Kepemilikan Institusional

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki peranan yang sangat penting dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham. Keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme monitor yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer.

Penelitian yang dilakukan oleh McConnell dan Servaes (1990), Murwaningsari (2009), Abbasi *et al.* (2012), Alfaraih *et al.* (2012), Tornyeva (2012), Alipour (2013) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja perusahaan. Penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Jaher dan Ali (2005) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan negatif terhadap kinerja perusahaan.

2.3.5 Komite Audit

Komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk membantu proses pengawasan terutama terkait dengan pengendalian internal, manajemen risiko, pelaporan keuangan dan aktivitas audit. Apabila komite audit perusahaan tidak memiliki keahlian keuangan khususnya keahlian akuntansi dan non-akuntansi maka pengendalian internal perusahaan akan lebih lemah (Zhang *et al.*, 2007).

Dalam Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG, 2006) tugas dari komite audit adalah membantu dewan komisaris memastikan bahwa :

1. Laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum,
2. Struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik,
3. Pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku,
4. Tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen.

Keberadaan komite audit sangat penting sebagai salah satu perangkat utama dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Komite audit dapat berfungsi membantu kelancaran tugas komisaris dalam melakukan penelahan terhadap kebenaran informasi yang disampaikan oleh direksi serta melakukan pengawasan terhadap manajemen perusahaan karena akan menjadi penghubung antara manajemen perusahaan dengan dewan komisaris maupun pihak luar lainnya. Collier (1993) menyatakan bahwa komite audit memiliki peranan yang

besar dalam peningkatan kualitas pelaporan keuangan dan merupakan bagian kontrol manajemen perusahaan.

Yasser, Entebang dan Mansor (2011) menganalisa tentang pengaruh tata kelola terhadap kinerja perusahaan pada 30 perusahaan besar pada tahun 2008-2009 di Pakistan Penelitian ini menggunakan variabel ROE dan NPM. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja perusahaan. Penelitian ini konsisten dengan Christensen *et al.* (2010), Fauzi dan Locke (2012), Gill dan Obradovich (2012), Bouaziz dan Triki (2012).

Penelitian yang dilakukan oleh Reddy *et al.* (2008), Tarus dan Omandi (2013) menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh signifikan negatif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Dar *et al.* (2011) menganalisa pengaruh tata kelola terhadap kinerja perusahaan pada perusahaan minyak dan gas yang terdaftar pada *Karachi Stock Exchange* pada periode 2004-2010 yang diukur menggunakan ROE dan *Profit Margin*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Sunday O Kajola (2008), Malik (2012) menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja perusahaan.

2.3.6 Komite Nominasi

Komite nominasi adalah komite yang terdiri dari tiga sampai lima eksternal member yang mewakili *stakeholders*. Terdapat 3 tugas dan tanggung

jawab komite di bidang nominasi menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pasal 6 yakni:

1. Memberikan rekomendasi kepada dewan komisaris mengenai komposisi jabatan, nama calon anggota direksi dan dewan komisaris, kebijakan kriteria dan kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota direksi dan dewan
2. Menelaah dan mengusulkan perencanaan suksesi anggota direksi dan dewan komisaris
3. Melakukan penilaian berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi dan pengembangan kemampuan anggota direksi dan dewan komisaris.

Jensen dan Murphy (1990) menyatakan bahwa dalam rangka untuk mengurangi masalah keagenan, perusahaan perlu menciptakan, menerapkan, dan membentuk serangkaian komite, salah satunya adalah untuk menyeimbangkan peran komite nominasi manajemen dan pemegang saham. Calleja (1999) menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki komite nominasi akan berprestasi lebih baik dibandingkan dengan perusahaan yang tidak memiliki komite dewan.

Christensen *et al.* (2010), Fauzi dan Locke (2012) melakukan penelitian dan menunjukkan bahwa komite nominasi berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja perusahaan yang diukur dengan menggunakan Tobin's Q.

Penelitian yang dilakukan oleh Malik (2012) tentang hubungan antara tata kelola terhadap harga saham perusahaan. Penelitian ini dilakukan pada 60 perusahaan yang terdaftar pada *Karachi Stock Exchange* pada tahun 2009 dan

2010. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya komite nominasi dapat meningkatkan nilai dari saham perusahaan.

Yameesri dan Herath (2010) meneliti tentang pengaruh karakteristik dewan dan komposisi kepemimpinan komisi dewan terhadap nilai perusahaan pada 245 perusahaan yang ada di Thailand. Sample yang digunakan adalah 245 non-finansial perusahaan yang terdaftar di *Thailand Stock Exchange* pada tahun 2004. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa audit nominasi berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Murwaningsari (2009).

2.3.7 Komite Remunerasi

Komite remunerasi bertugas dalam membantu dewan komisaris untuk menentukan kebijakan dan struktur remunerasi (gaji, honorarium, insentif dan tunjangan yang bersifat tetap dan variabel) bagi anggota direksi dan dewan komisaris. Adapun tugas dan tanggung jawab komite remunerasi menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pasal 6 yakni:

1. Memberikan rekomendasi kepada dewan komisaris mengenai kebijakan, besaran atau struktur remunerasi bagi anggota direksi dan dewan komisaris.
2. Melakukan penelahan atas pernyataan kontrak kerja dan kinerja masing-masing anggota direksi dan dewan komisaris.

Jensen dan Murphy (1990), Komite remunerasi memainkan peran penting dalam mengurangi masalah keagenan di sebuah perusahaan dengan

menerapkan sistem dan mekanisme insentif yang lebih baik sehingga dapat menyeimbangkan tujuan yang ingin dicapai oleh manajemen dan pemegang saham. Montemayor (1996) mengemukakan bahwa perusahaan akan menjalankan perusahaan jika kebijakan remunerasi terkait dengan operasi perusahaan .

Fauzi dan Locke (2012) melakukan penelitian dan menunjukkan bahwa komite remunerasi berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja perusahaan. Penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Christensen *et al.* (2010). Penelitian yang dilakukan oleh Reddy *et al.* (2008), Malik (2012) menunjukkan bahwa komite remunerasi berpengaruh signifikan negatif terhadap kinerja perusahaan.

Klein (1998) mengusulkan bahwa tugas komite remunerasi adalah untuk mengawasi jumlah seluruh komite remunerasi manajer senior dan merancang skema remunerasi yang lebih baik untuk mengurangi konflik antara manajer dan pemegang saham

Penelitian yang dilakukan oleh Yameesri dan Herath (2010) menunjukkan bahwa audit remunerasi berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kinerja perusahaan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Murwaningsari (2009).

2.4 Pengaruh Variabel Kontrol terhadap Dependen

2.4.1. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan hal yang penting dalam proses pelaporan keuangan. Ukuran perusahaan dalam penelitian ini diukur dengan melihat seberapa besar aset yang dimiliki oleh sebuah perusahaan.

Perusahaan yang memiliki total aset besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah mencapai tahap kedewasaan, dimana dalam tahap ini arus kas perusahaan sudah positif dan dianggap memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang relatif stabil dan lebih mampu menghasilkan laba dibandingkan perusahaan dengan total aset yang kecil.

Penelitian mengenai hubungan antara ukuran perusahaan dan kinerja perusahaan juga masih beragam. Penelitian yang dilakukan oleh Bohren dan Strom (2010), Rashid (2011), Sheikh *et al.* (2011), Bouaziz dan Triki (2012), Gill dan Obradovich (2012), Najjar (2012), Reyna *et al.* (2012), Hamdan *et al.* (2013), Mehrabani dan Dadgar (2013), Rehman dan Shah (2013), Alipour (2013) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja perusahaan.

Reddy *et al.* (2008), Hu *et al.* (2009), Wang dan Oliver (2009), Yameesri dan Herath (2010), Abbasi *et al.* (2012), Kumar dan Singh (2012), Tornyeva dan Wereco (2012) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan negatif terhadap kinerja perusahaan.

Penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Khatab *et al.* (2011), Chugh *et al.* (2011), Alfaraih *et al.* (2012), AI-Matari *et al.*

(2012) bahwa ukuran perusahaan tidak pengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan.

2.4.2 Solvabilitas

Salah satu faktor penting dalam unsur pendanaan adalah rasio solvabilitas.

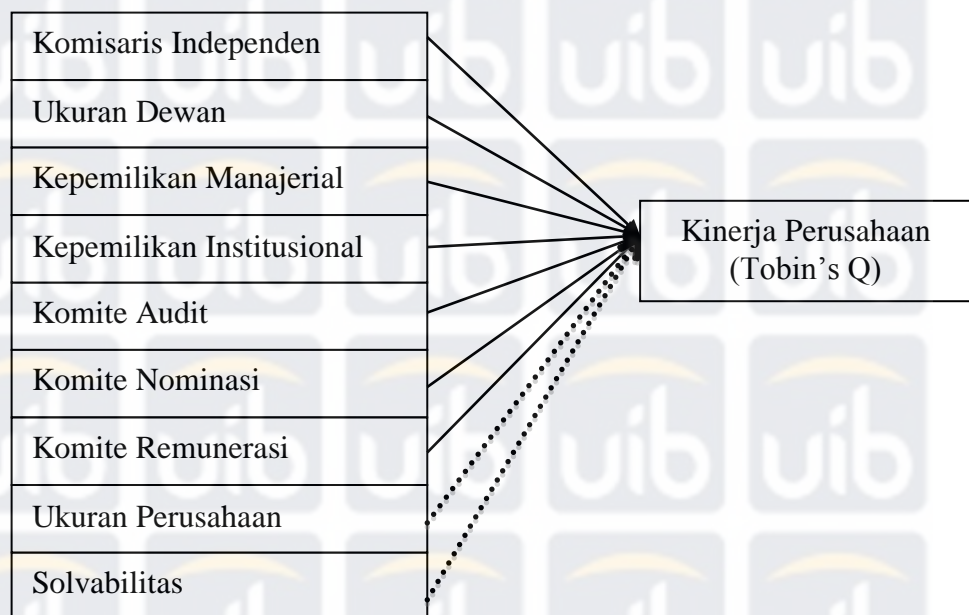
Solvabilitas merupakan rasio yang membandingkan total hutang terhadap keseluruhan aset suatu perusahaan.

Khatab *et al.* (2011) juga menunjukkan bahwa solvabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja perusahaan. Hal ini mengindikasikan bahwa nilai perusahaan mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya jumlah hutang yang dimiliki perusahaan. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Jaafar dan EL-Shawa (2009), Wang dan Oliver (2009), Khatab *et al.* (2011), Rashid (2011), Sheikh *et al.* (2011), Abbasi *et al.* (2012), Hamdan *et al.* (2013) menunjukkan bahwa solvabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja perusahaan.

Reddy *et al.* (2008), Christensen *et al.* (2010), Alfaraih *et al.* (2012), Kumar dan Singh (2012), Alipour (2013) mengemukakan bahwa solvabilitas berpengaruh signifikan negatif terhadap kinerja perusahaan. Penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Haniffa dan Hudaib (2006), Irina dan Nadezhda (2009), Rehman dan Shah (2013) bahwa solvabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan.

2.5 Model Penelitian

Model penelitian dalam penelitian ini adalah pengaruh tata kelola perusahaan terhadap kinerja perusahaan dengan menggunakan komisaris independen, ukuran dewan, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komite audit, komite nominasi, komite remunerasi, ukuran perusahaan dan solvabilitas. Penelitian ini dengan berpedoman pada penelitian yang dilakukan oleh (Fauzi & Locke, 2012) dan (Abbasi, Kalantari, & Abbasi, 2012) yang dapat dilihat pada Gambar 2.1 di bawah ini.



Gambar 2.1 Model penelitian, sumber: Data sekunder diolah (2014).

2.6 Perumusan Hipotesis

Berdasarkan uraian dan kerangka model diatas maka hipotesis untuk penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H₁: Komisaris independen berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja perusahaan.

H₂: Ukuran dewan berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja perusahaan.

H₃: Kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja perusahaan.

H₄: Kepemilikan institusional berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja perusahaan.

H₅: Komite audit berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja perusahaan.

H₆: Komite nominasi berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja perusahaan.

H₇: Komite remunerasi berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja perusahaan.